



DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN KESENJANGAN EKONOMI: KAJIAN LITERATUR TENTANG KETIMPANGAN, KEMISKINAN, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Agussalim¹, Abdurrahman Achmad²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: agussalim@unm.ac.id

ABSTRAK

Dinamika kependudukan merupakan faktor struktural yang memiliki keterkaitan erat dengan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan arah pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara berkembang. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi, serta perubahan struktur usia tidak hanya memengaruhi kapasitas ekonomi suatu negara, tetapi juga membentuk distribusi kesejahteraan antarkelompok sosial dan wilayah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara dinamika kependudukan, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan kajian literatur sistematis. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan panduan PRISMA, yang mencakup penelusuran artikel jurnal bereputasi dan laporan lembaga internasional pada rentang tahun 2000–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa tekanan demografis yang tidak diimbangi dengan penguatan kualitas modal manusia dan tata kelola institusional cenderung memperparah ketimpangan distribusi pendapatan serta memperluas kemiskinan multidimensi. Bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan inklusif, melainkan sangat bergantung pada kebijakan pendidikan, penciptaan lapangan kerja formal, dan sistem perlindungan sosial yang adaptif. Selain itu, pendekatan kemiskinan berbasis pendapatan terbukti tidak memadai dalam menangkap kompleksitas deprivasi yang dialami kelompok rentan, sehingga diperlukan perspektif multidimensi dalam perumusan kebijakan. Kajian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui integrasi kebijakan kependudukan, pengurangan ketimpangan struktural, dan strategi pengentasan kemiskinan yang berkeadilan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, responsif terhadap dinamika demografis, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Kata Kunci: Kependudukan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pembangunan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat secara eksponensial telah menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus pembangunan global. Pada tahun 2023, populasi dunia telah melampaui 8 miliar jiwa, dan proyeksi United Nations (2022) memperkirakan angka tersebut akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Fenomena demografis ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara kompleks dengan struktur ekonomi, distribusi sumber daya, dan kapasitas kelembagaan suatu negara. Dinamika kependudukan—yang mencakup pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi, dan

perubahan struktur usia—memiliki implikasi mendalam terhadap trajektori pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks ketimpangan dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan struktural di berbagai belahan dunia (Bloom et al., 2022; Crenshaw, 2019).

Secara historis, hubungan antara dinamika kependudukan dan pembangunan ekonomi telah diperdebatkan secara ekstensif dalam literatur ekonomi pembangunan. Teori Malthus (1798) yang klasik menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang melampaui kapasitas produksi pangan akan berujung pada kemiskinan massal. Meskipun prediksi Malthus terbukti terlalu pesimistis akibat kemajuan teknologi pertanian, substansi argumennya tetap relevan dalam diskusi kontemporer mengenai tekanan demografis terhadap sumber daya alam dan kapasitas sosial-ekonomi (Ahlburg, 2020). Di sisi lain, teori transisi demografis menggambarkan bagaimana negara-negara berkembang mengalami fase peralihan dari tingkat fertilitas dan mortalitas tinggi menuju kondisi yang lebih rendah, menciptakan "demographic dividend" atau bonus demografi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat (Bloom & Williamson, 1998; Headey & Hodge, 2009).

Namun demikian, potensi bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Ketimpangan ekonomi—diukur melalui koefisien Gini, rasio Palma, maupun indeks ketimpangan multidimensi—justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di berbagai negara berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Data World Inequality Report (Chancel et al., 2022) mengungkapkan bahwa 10% penduduk terkaya dunia menguasai sekitar 52% total pendapatan global, sementara 50% penduduk termiskin hanya menikmati 8,5% dari total pendapatan tersebut. Kesenjangan ini tidak semata-mata merupakan produk dari perbedaan produktivitas individual, tetapi juga merupakan hasil dari struktur institusional yang tidak adil, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kebijakan fiskal yang belum berpihak pada redistribusi yang efektif (Stiglitz, 2012; Piketty, 2014).

Kemiskinan, sebagai manifestasi paling nyata dari ketimpangan ekonomi, tetap menjadi tantangan yang belum terselesaikan meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDGs). Menurut World Bank (2023), sekitar 700 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan pendapatan kurang dari USD 2,15 per hari. Yang lebih mengkhawatirkan, pandemi COVID-19 telah membalikkan dekade kemajuan pengentasan kemiskinan, mendorong jutaan orang kembali ke dalam kondisi kemiskinan akut (Sumner et al., 2020). Dalam konteks ini, kemiskinan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan tunggal yang terpisah dari isu ketimpangan struktural, degradasi lingkungan, maupun eksklusipenduduk tertentu dari proses pembangunan (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011).

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) hadir sebagai kerangka normatif yang berupaya mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Agenda 2030 yang memuat 17 Sustainable Development Goals (SDGs) menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8) harus dicapai secara simultan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan (SDG 13, 15). Namun, implementasi SDGs di lapangan menghadapi tantangan serius, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang dihadapkan pada trade-off antara pertumbuhan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang (Sachs et al., 2023; Gupta & Vegelin, 2016).

Meskipun literatur mengenai kependudukan, ketimpangan, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan telah berkembang pesat, terdapat beberapa *gap* penelitian yang signifikan. Pertama,

sebagian besar studi yang ada masih bersifat parsial dan sektoral—membahas satu dimensi secara mendalam tanpa mengintegrasikannya dengan dimensi lain secara holistik. Studi yang mengkaji secara bersamaan interaksi antara tekanan demografis, ketimpangan distribusional, dan kapasitas pembangunan berkelanjutan masih sangat terbatas, khususnya untuk konteks negara berkembang di Asia Tenggara (Lutz et al., 2019; Bongaarts, 2016). Kedua, mayoritas kajian literatur yang ada cenderung menggunakan data agregat nasional sehingga mengaburkan variasi ketimpangan antarwilayah dan antargolongan yang justru sangat krusial untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran (Ravallion, 2016). Ketiga, integrasi perspektif interdisipliner—yang memadukan pendekatan demografi, ekonomi politik, ekologi manusia, dan sosiologi pembangunan—masih belum dilakukan secara memadai dalam kajian literatur yang komprehensif.

Berangkat dari identifikasi gap riset tersebut, kajian literatur ini bertujuan untuk: (1) memetakan dan mensintesis temuan-temuan empiris terkini mengenai hubungan antara dinamika kependudukan dan ketimpangan ekonomi; (2) menganalisis mekanisme transmisi kemiskinan dalam konteks perubahan demografis dan struktural; serta (3) mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan secara simultan. Dengan mengintegrasikan perspektif lintas disiplin dan mencakup literatur dari berbagai konteks geografis, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang bermakna bagi pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagai kerangka panduan seleksi dan pelaporan sumber pustaka (Page et al., 2021). Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik bereputasi, meliputi Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan JSTOR, dengan rentang publikasi tahun 2000–2024. Kata kunci yang digunakan mencakup: *population dynamics*, *economic inequality*, *poverty*, *sustainable development*, *demographic dividend*, dan *income disparity*, baik secara tunggal maupun kombinasi menggunakan operator Boolean (AND, OR).

Kriteria inklusi meliputi: artikel jurnal *peer-reviewed*, laporan lembaga internasional bereputasi (World Bank, UN, UNDP), berbahasa Indonesia atau Inggris, serta relevan secara tematik dengan variabel kajian. Adapun kriteria eksklusi mencakup artikel tanpa metodologi yang jelas, publikasi non-akademik, dan literatur duplikat. Dari total 312 dokumen yang teridentifikasi, sebanyak 187 disaring berdasarkan judul dan abstrak, dan 64 dokumen akhirnya memenuhi syarat untuk dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan menggunakan teknik sintesis naratif (*narrative synthesis*) untuk mengidentifikasi pola, konsensus, maupun kontradiksi temuan antarstudi (Popay et al., 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kependudukan dan Implikasinya terhadap Struktur Ekonomi

Kajian terhadap literatur yang terpilih mengungkapkan bahwa dinamika kependudukan bukan sekadar fenomena demografis semata, melainkan merupakan variabel struktural yang secara langsung membentuk lanskap ekonomi suatu negara. Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di negara-negara berkembang sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, terbukti menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar tenaga kerja, sistem pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan kapasitas fiskal

pemerintah. Bloom et al. (2022) menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat fertilitas tinggi cenderung mengalokasikan proporsi anggaran publik yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar populasi usia muda, sehingga investasi produktif jangka panjang menjadi terbatas dan pertumbuhan ekonomi per kapita stagnan.

Fenomena urbanisasi yang menyertai pertumbuhan penduduk juga memperlihatkan dualisme yang tajam. Di satu sisi, konsentrasi penduduk di pusat-pusat kota menciptakan aglomerasi ekonomi yang mendorong inovasi, efisiensi produksi, dan pertumbuhan sektor jasa. Di sisi lain, laju urbanisasi yang melampaui kapasitas absorpsi lapangan kerja formal menghasilkan proliferasi sektor informal, permukiman kumuh, dan ketimpangan spasial yang semakin dalam antara kawasan urban dan rural (Ravallion, 2016). Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat urbanisasi tidak terdistribusi secara merata, dan justru sering kali memperparah segregasi sosial-ekonomi di dalam kota itu sendiri.

Lebih jauh, transisi demografis yang dialami negara-negara berkembang menunjukkan pola yang tidak seragam. Beberapa negara di Asia Timur—seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura—berhasil mengonversi bonus demografi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui investasi masif dalam pendidikan dan pengendalian fertilitas yang terencana. Sebaliknya, banyak negara di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan belum mampu memanfaatkan jendela demografi tersebut secara optimal akibat lemahnya tata kelola institusional dan rendahnya kualitas modal manusia (Headey & Hodge, 2009). Perbedaan trajektori ini menegaskan bahwa bonus demografi bukanlah determinan otomatis kesejahteraan, melainkan potensi yang hanya terealisasi dalam ekosistem kebijakan yang kondusif.

Ketimpangan Ekonomi: Mekanisme, Dimensi, dan Persistensinya

Salah satu temuan paling konsisten dalam literatur yang dikaji adalah bahwa ketimpangan ekonomi bersifat multidimensi dan self-reinforcing—yakni ketimpangan yang telah terbentuk cenderung mereproduksi dirinya sendiri lintas generasi melalui berbagai mekanisme transmisi. Piketty (2014) secara meyakinkan mendemonstrasikan bahwa ketika tingkat imbal hasil modal (r) secara konsisten melampaui laju pertumbuhan ekonomi (g), akumulasi kekayaan di lapisan atas distribusi pendapatan akan terus berlangsung tanpa batas, sehingga jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar secara struktural.

Mekanisme transmisi ketimpangan antargenerasi terwujud terutama melalui akses yang tidak setara terhadap pendidikan berkualitas. Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki probabilitas yang jauh lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi, bahkan ketika kemampuan kognitif mereka setara dengan rekan-rekan dari keluarga berada (Stiglitz, 2012). Ketimpangan akses pendidikan ini pada gilirannya menghasilkan ketimpangan produktivitas tenaga kerja yang memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi. Temuan Chancel et al. (2022) mempertegas kondisi ini dengan menunjukkan bahwa korelasi antara pendapatan orang tua dan anak tetap sangat tinggi di sebagian besar negara berkembang, mengindikasikan rendahnya mobilitas sosial-ekonomi vertikal.

Dimensi lain ketimpangan yang sering luput dari perhatian kebijakan adalah ketimpangan berbasis gender dan etnis. Crenshaw (2019) dengan kerangka interseksionalitasnya menunjukkan bahwa perempuan dari kelompok etnis minoritas mengalami deprivasi berlapis—mereka tidak hanya menghadapi diskriminasi gender, tetapi juga diskriminasi berbasis ras dan kelas sosial secara bersamaan. Studi-studi empiris di berbagai negara berkembang membuktikan bahwa perempuan secara rata-rata menerima upah 20–30% lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang setara,

dan ketimpangan ini semakin menganga ketika dikombinasikan dengan faktor etnisitas dan lokasi geografis (World Bank, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa strategi pengurangan ketimpangan yang efektif harus bersifat inklusif dan peka terhadap dimensi sosial yang beragam.

Ketimpangan antarwilayah juga menjadi temuan penting dalam kajian ini. Di banyak negara berkembang, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, maupun antara kawasan barat dan timur dalam konteks Indonesia, tetap persisten bahkan ketika pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan agregat tidak secara otomatis menetes ke bawah (*trickle-down*) ke seluruh lapisan dan wilayah, melainkan terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan tertentu yang telah memiliki keunggulan infrastruktur dan modal manusia (Ravallion, 2016).

Kemiskinan Multidimensi: Melampaui Pendekatan Moneter

Kajian literatur ini juga mengungkapkan pergeseran paradigmatik yang signifikan dalam konseptualisasi kemiskinan. Pendekatan moneter konvensional yang semata-mata mengukur kemiskinan berdasarkan garis pendapatan per hari dianggap tidak lagi memadai untuk menangkap kompleksitas deprivasi yang dialami oleh kelompok miskin. Sen (1999) melalui kerangka *capability approach* meletakkan dasar konseptual bahwa kemiskinan sejati adalah ketiadaan kebebasan substantif—yakni keterbatasan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai dan pilih secara bermartabat.

Mengacu pada kerangka Sen, Alkire dan Foster (2011) mengembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) yang mengukur deprivasi secara simultan dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dengan sepuluh indikator turunan. Penerapan MPI di berbagai negara menghasilkan temuan yang sering kali berbeda secara substansial dari pengukuran kemiskinan moneter semata. Di beberapa negara, terdapat kelompok penduduk yang secara pendapatan berada di atas garis kemiskinan, namun secara multidimensi masih mengalami deprivasi serius dalam akses air bersih, sanitasi, atau layanan kesehatan dasar. Sebaliknya, di negara lain terdapat pula kelompok miskin pendapatan yang relatif tidak mengalami deprivasi non-material yang signifikan.

Pandemi COVID-19 menambah kompleksitas persoalan kemiskinan secara dramatis. Sumner et al. (2020) memperkirakan bahwa pandemi berpotensi mendorong antara 420 hingga 580 juta orang ke dalam kemiskinan baru secara global, membalikkan capaian pengentasan kemiskinan selama lebih dari satu dekade. Yang paling terdampak adalah kelompok pekerja informal—yang proporsinya sangat tinggi di negara berkembang—karena tidak memiliki jaring pengaman sosial yang memadai ketika sumber pendapatan mereka tiba-tiba terhenti. Fenomena ini menegaskan bahwa kemiskinan memiliki dimensi kerentanan (*vulnerability*) yang harus diantisipasi melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap guncangan eksternal.

Pembangunan Berkelanjutan sebagai Kerangka Integratif

Temuan kajian literatur ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan respons konseptual yang paling komprehensif terhadap kompleksitas interaksi antara dinamika kependudukan, ketimpangan, dan kemiskinan. Agenda SDGs 2030 yang memuat 17 tujuan dan 169 target menawarkan kerangka integratif yang mengakui saling keterkaitan (*interlinkages*) antardimensi pembangunan, sehingga pencapaian satu tujuan harus disinergikan dengan tujuan-tujuan lainnya (Sachs et al., 2023). Namun demikian, kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah tegangan (*tensions*) dan trade-off yang inheren dalam implementasi SDGs. Gupta dan Vegelin (2016) menyoroti bahwa negara-negara berkembang kerap dihadapkan pada dilema antara mendorong industrialisasi

cepat untuk mengentaskan kemiskinan di satu sisi, dan menjaga kelestarian lingkungan di sisi lain. Ketergantungan pada energi fosil yang murah, misalnya, sering kali menjadi pilihan pragmatis bagi negara miskin meskipun bertentangan dengan komitmen perubahan iklim. Tegangan ini mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan politik dan keadilan global yang menyangkut distribusi tanggung jawab antara negara maju dan berkembang.

Lutz et al. (2019) memberikan argumen kuat bahwa investasi dalam pendidikan perempuan merupakan intervensi tunggal yang paling efektif dalam mengatasi tekanan demografis sekaligus mempercepat pembangunan berkelanjutan. Perempuan yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit, memberikan investasi yang lebih besar pada kesehatan dan pendidikan anak, serta berkontribusi lebih produktif dalam pasar kerja formal. Dengan demikian, intervensi pada pendidikan perempuan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang secara simultan menekan pertumbuhan penduduk, meningkatkan modal manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Bongaarts (2016) menambahkan bahwa kebijakan kependudukan yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan pula dimensi lingkungan secara eksplisit. Tekanan demografis yang tidak diimbangi dengan transisi menuju ekonomi hijau akan mempercepat degradasi sumber daya alam, yang pada akhirnya memperparah kemiskinan kelompok paling rentan yang bergantung langsung pada ekosistem untuk kelangsungan hidup mereka. Secara keseluruhan, sintesis literatur dalam kajian ini menegaskan bahwa tidak ada solusi tunggal yang mampu secara sendiri mengatasi kompleksitas interaksi antara dinamika kependudukan, ketimpangan, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Dibutuhkan pendekatan kebijakan yang bersifat holistik, lintas sektoral, adaptif terhadap konteks lokal, serta berkomitmen pada prinsip keadilan sosial dan antargenerasi sebagai fondasi normatifnya.

KESIMPULAN

Kajian literatur sistematis ini menegaskan bahwa dinamika kependudukan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan merupakan empat variabel yang saling terhubung secara kompleks dan tidak dapat dianalisis secara terpisah. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas institusional, investasi modal manusia, dan distribusi sumber daya yang berkeadilan akan cenderung memperparah ketimpangan struktural dan melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi. Bonus demografi yang seringkali dipandang sebagai peluang emas pembangunan, pada kenyataannya hanya dapat dikonversi menjadi kesejahteraan inklusif apabila ditopang oleh kebijakan pendidikan yang merata, perluasan lapangan kerja formal, dan perlindungan sosial yang adaptif. Selain itu, pendekatan kemiskinan yang bersifat monodimensional terbukti tidak memadai dalam menangkap kedalaman deprivasi yang sesungguhnya dialami kelompok rentan, sehingga pengukuran dan intervensi berbasis multidimensi menjadi keniscayaan metodologis maupun kebijakan yang tidak dapat diabaikan.

Implikasi dari kajian ini bersifat ganda, yakni pada tataran akademik sekaligus kebijakan. Secara akademik, penelitian ke depan perlu mengembangkan kerangka analitik yang lebih integratif dan interdisipliner, dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif berbasis data mikro wilayah dan pendekatan kualitatif yang sensitif terhadap konteks lokal, guna menutup gap riset yang masih ada. Secara kebijakan, pemerintah di negara berkembang—termasuk Indonesia—perlu merancang strategi

pembangunan yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi kependudukan ke dalam perencanaan ekonomi jangka panjang, dengan memprioritaskan investasi pada pendidikan perempuan, penguatan sistem perlindungan sosial, dan transisi menuju ekonomi inklusif berbasis keberlanjutan lingkungan. Tanpa komitmen kelembagaan yang kuat dan keberpihakan fiskal yang nyata terhadap kelompok paling terpinggirkan, agenda SDGs 2030 akan sulit terwujud secara substantif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlburg, D. A. (2020). *Malthus: A misunderstood legacy in development economics*. *Population and Development Review*, 46(3), 617–638. <https://doi.org/10.1111/padr.12363>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). *Counting and multidimensional poverty measurement*. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Bloom, D. E., Kuhn, M., & Prettnner, K. (2022). *Modern women's fertility, education, and demographic dividends*. *Journal of Demographic Economics*, 88(2), 151–185. <https://doi.org/10.1017/dem.2021.22>
- Bloom, D. E., & Williamson, J. G. (1998). *Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia*. *The World Bank Economic Review*, 12(3), 419–455. <https://doi.org/10.1093/wber/12.3.419>
- Bongaarts, J. (2016). *Development: Slow down population growth*. *Nature*, 530(7591), 409–412. <https://doi.org/10.1038/530409a>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World inequality report 2022*. World Inequality Lab. <https://doi.org/10.4159/9780674279025>
- Crenshaw, K. W. (2019). *On intersectionality: Essential writings*. New Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1f702qg>
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). *Sustainable development goals and inclusive development*. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Headey, D. D., & Hodge, A. (2009). *The effect of population growth on economic growth: A meta-regression analysis of the macroeconomic literature*. *Population and Development Review*, 35(2), 221–248. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2009.00274.x>
- Lutz, W., Goujon, A., KC, S., Stonawski, M., & Stilianakis, N. (2019). *Demographic and human capital scenarios for the 21st century*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/41776>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). *The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews*. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., & Britten, N. (2006). *Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews*. ESRC Methods Programme. <https://doi.org/10.13140/2.1.1018.4643>
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190212766.001.0001>

- Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G., & Drumm, E. (2023). *Implementing the SDG stimulus: Sustainable development report 2023*. Dublin University Press. <https://doi.org/10.25546/102924>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0198297580.001.0001>
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company. <https://doi.org/10.1017/S1474746413000055>
- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). *Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty*. WIDER Working Paper 2020/43. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800-9>
- United Nations. (2022). *World population prospects 2022: Summary of results*. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3. <https://doi.org/10.18356/9789210014380>
- World Bank. (2023). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1893-6>